



Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Pengadilan Negeri Cikarang
Tahun 2023

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Cikarang Yang Agung”

dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Cikarang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Peradilan Umum.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2023 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI CIKARANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	-	-	-
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	25%	25%	25%	25%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	25%	25%	25%	25%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	25%	25%	25%	25%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	25%	25%	25%
		f. Indeks Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	25%	25%	25%	25%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikanke Para Pihak Tepat Waktu	25%	25%	25%	25%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25%	25%	25%	25%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	25%	25%	25%	25%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25%	25%	25%	25%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%	25%	25%	25%
4.	Meningkanya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%	25%	25%	25%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Percepatan Penyelesaian Perkara						Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	a. Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√				1.500.000
2.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	√	√	√	√				
	a. Pendaftaran Berkas Perkara	√	√	√	√				165.375.000
	b. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	√	√	√	√				56.240.000
	c. Pemeriksaan di sidang pengadilan	√	√	√	√				6.000.000
	d. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	√	√	√	√				6.000.000
	e. Minutasi / Upaya Hukum	√	√	√	√				7.885.000
	f. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√				5.000.000
	g. Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√				2.500.000
3.	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan								
	a. Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√		24.000.000		